



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Kecil Menengah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, usaha kecil adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang, yang digolongkan sebagai industri kerajinan dan rumah tangga, tenaga kerja 5-19 orang sebagai industri kecil, perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 orang sebagai industri menengah, dan usaha dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai industri besar. Usaha Kecil dan Menengah disingkat dengan UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Usaha kecil menengah saat ini merupakan usaha yang berkembang pesat di negara Indonesia. Usaha ini sangat berperan dalam memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat karena usaha kecil menengah mengurangi angka pengangguran.

1. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. kriteria kekayaan bersih usaha kecil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun dan dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas > Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 :

- a. Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

2. Usaha Menengah

Usaha Menengah menurut (BPS) tahun 2013 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari sebuah bank sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ciri-ciri usaha menengah :

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain : bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek (BPJS), pemeliharaan kesehatan dll.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terampil.

3. Peranan Usaha Kecil Menengah

Industri kecil dan menengah (UKM) di Indonesia menurut (BPS) tahun 2013, memiliki peranan yang cukup besar, antara lain penyerapan tenaga kerja yang tinggi, penghasil devisa dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia mengalami masalah seperti negara berkembang lainnya, masalah tersebut berupa tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan tenaga kerja.

Industri kecil dan menengah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti halnya industri besar. Industri kecil dan menengah tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, bahkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kemampuan industri kecil dan menengah menyerap tenaga kerja yang pendidikannya rendah sangat sesuai dengan angkatan kerja Indonesia yang rata-rata pendidikan rendah.

Penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi akan meningkatkan pendapatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

4. Permasalahan Usaha Kecil dan Menengah

a. Faktor Internal

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. UKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan yang rumit secara administratif dan teknis dari bank.

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM, baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit berkembang dengan optimal. Disamping itu unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

3. Lembaga jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah karena produk yang dihasilkannya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau pasar tingkat internasional dan promosi yang baik.

b. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Kebijaksanaan pemerintah menumbuhkan Usaha Kecil Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara pengusaha kecil dan pengusaha besar.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi otonomi daerah

Dengan berlakunya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.

Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika

kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing mereka.

4. Implikasi perdagangan bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien. Sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000) dan isu Hak Asasi Manusia serta isu ketenagakerjaan.

5. Sifat produk dengan *life time* pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan *life time* pendek.

6. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

5. Upaya Pengembangan UKM

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM maka perlu diupayakan langkah-langkah untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan menurut (Sriyana dalam jurnal tahun 2010) adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif seperti :

mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya, sehingga unit bisnis yang ada dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Bantuan permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun nonbank. Lembaga Keuangan mikro bank antara Lain: BRI unit desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

3. Perlindungan usaha

Jenis-jenis usaha tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk

memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi, pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk lembaga khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhan kembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7. Memantapkan asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan promosi

Untuk lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra

usahanya.

9. Mengembangkan kerjasama yang setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

2.2 Akuntansi Biaya

Menurut Mulyadi (2015:7), Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk dan jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya dalam perhitungan harga pokok produksi berperan untuk menetapkan, menganalisa, dan melaporkan pos-pos biaya yang mendukung laporan keuangan sehingga dapat menunjukkan data yang wajar. Akuntansi biaya juga menyajikan data yang berkaitan dengan biaya untuk berbagai tujuan salah satunya untuk penetapan harga pokok produksi maka biaya yang terjadi dalam perusahaan harus digolongkan dan dicatat dengan sebenarnya sehingga memungkinkan perhitungan harga pokok produksi dilakukan secara teliti, rinci dan benar.

Akuntansi biaya membantu pihak manajemen dalam hal klasifikasi biaya, yaitu pengelompokan biaya kedalam kelompok tertentu menurut persamaan yang ada untuk memberi informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Pengklasifikasian biaya adalah proses pengklasifikasian secara sistematis atau keseluruhan elemen yang ada kedalam golongan tertentu untuk dapat memberikan keterangan atau arti yang lebih penting. Informasi biaya harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan informasi biaya oleh pengguna informasi itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.3 Biaya dan Klasifikasi Biaya

Biaya menurut Mulyadi (2015:8) adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Kos (*cost*) berbeda dengan biaya (*expense*) menurut Suwardjono (2009:298) kos yang melekat pada operasi perusahaan disebut dengan kos operasi. Kos operasi yang dianggap melekat dengan produk yang telah terjual menimbulkan pendapatan akan menjadi pengukur biaya (*expense*). Jadi, dalam suatu periode operasi, angka biaya diukur dengan kos yang melekat pada biaya tersebut. Itulah sebabnya pengertian kos (*cost*) harus dibedakan dengan biaya (*expense*), biaya merupakan wadah sedangkan kos merupakan pengukur.

Mulyadi (2015:13) biaya dapat diklasifikasikan menurut :

1. Objek Pengeluaran

Klasifikasi biaya menurut nama pengeluaran objek biaya. Seperti contoh : semua biaya yang berhubungan dengan perlengkapan disebut biaya perlengkapan.

2. Klasifikasi Biaya Berdasarkan Fungsi Pokok Perusahaan

Klasifikasi biaya menurut fungsi pokok perusahaan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

a. Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap jual. Contoh : biaya produksi busana.

b. Biaya Pemasaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Contoh : Biaya Iklan.

c. Biaya Administrasi Umum

Biaya administrasi umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh : Biaya Gaji.

3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai

Klasifikasi biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai dapat dibagi menjadi 2 kelompok, oleh Mulyadi (2015:14) :

a. Biaya Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi dikarenakan adanya sesuatu yang dibiayai, contoh : biaya bahan baku langsung.

b. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya ini tidak mudah diidentifikasi dengan produk.

4. Perilaku Biaya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume Kegiatan

Klasifikasi biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume, oleh Mulyadi (2015:14) terbagi menjadi :

a. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh : biaya bahan baku.

b. Biaya Semivariabel

Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan volume kegiatan, biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya listrik, yang terdiri dari biaya abondemen listrik dan biaya pemakaian listrik.

c. Biaya Semifixed

Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada volume produksi tertentu.

d. Biaya Tetap

Biaya tetap adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu.

Contoh : biaya gaji seorang manajer.

5. Jangka Waktu Manfaatnya

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, Mulyadi (2015:16) dibagi menjadi 2:

a. Pengeluaran Modal

Pengeluaran modal adalah biaya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi (1 tahun kalender). Pengeluaran modal terjadi pada saat dibebankan sebagai kos aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi. Contoh : pembelian aktiva gedung dan peralatan.

b. Pengeluaran Pendapatan

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memiliki manfaat dalam periode akuntansi ketika terjadinya pengeluaran tersebut dan dibebankan sebagai biaya dan dihubungkan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran tersebut.

Contoh : biaya iklan.

Biaya Bahan Baku Langsung

Biaya bahan baku langsung menurut Bustami dan Nurlela (2012:12) adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Contoh: Kayu dalam pembuatan meubel, kain dalam pembuatan pakaian.

Biaya Tenaga Kerja

Menurut Mursyidi (2010:213) mengatakan bahwa Biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi dua, yaitu (1) biaya tenaga kerja langsung (*direct labor*), dan (2) biaya tenaga kerja tidak langsung (*indirect labor*). Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi, misalnya tukang dan pekerja pabrik. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan produksi, misalnya gaji direktur produksi, pengawas, dan administrasi produksi.

Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela (2012:12), “Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang terjadi ketika tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengkonversi baha baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai”.

Biaya Overhead Pabrik

Menurut Bustami dan Nurlela (2012:13) Biaya *overhead* dikelompokan menjadi beberapa elemen, yakni:

- a. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) adalah bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contoh: Lem, amplas dan Paku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi dapat ditelusuri kepada produk selesai. Contoh: gaji satpam pabrik, pekerja bagian pemeliharaan dan pegawai pabrik.

2.4 Perhitungan Harga Pokok Produksi

a. Pengertian Harga Pokok Produksi

Perhitungan harga pokok produksi dalam suatu perusahaan industri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik pihak manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan. Untuk memenuhi tujuan perhitungan harga pokok produksi tersebut akuntansi biaya mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk. Pengertian menurut Mulyadi (2015:14) yaitu “Harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual”.

Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela (2012:49), harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir. pengertian-pengertian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi, dimana biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perhitungan Harga Pokok Produksi

Perhitungan harga pokok produksi menurut Mulyadi (2015:20) adalah untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Pada umumnya biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik. Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung disebut juga dengan biaya utama (*prime cost*), sedangkan yang lain disebut biaya konversi (*conversion cost*). Biaya-biaya ini dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi.

Penetapan harga pokok produksi yang tepat sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Terdapat dua kemungkinan yang akan ditemui jika perusahaan tidak teliti dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi, yaitu:

1. Harga pokok yang diperhitungkan terlalu rendah

Rendahnya harga pokok yang ditetapkan dapat merugikan perusahaan itu sendiri karena harga pokok yang rendah akan menyebabkan harga jualnya pun menjadi rendah. Walaupun perusahaan dapat menjual produknya dengan cepat karena harga jual yang terlalu rendah, akan tetapi dapat merugikan perusahaan karena keuntungan yang didapat tidak menutupi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut, menurut Mulyadi (2015:49).

2. Harga pokok yang diperhitungkan terlalu tinggi

Kondisi ini juga dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan karena harga pokok yang tinggi akan menyebabkan harga jual produk di pasar menjadi mahal. Sehingga akan sulit bagi perusahaan dalam memasarkan produknya dan kalah dalam bersaing dengan perusahaan lain, menurut Mulyadi (2015:49).

c. Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi

Menurut Mulyadi (2015:71) di dalam sebuah perusahaan yang berproduksi massa, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk :

1. Menentukan harga jual

Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian biaya produksi dapat dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan disamping informasi biaya lain serta informasi nonbiaya.

2. Memantau realisasi biaya produksi

Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, maka manajemen memerlukan sebuah informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu akuntansi biaya sering digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi telah mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Jadi pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode harga pokok proses.

3. Menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan di

dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya nonproduksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk suatu periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode.

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca

Ketika manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Disamping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses.

2.5 Metode Pengumpulan Biaya Produksi

Menurut Usry (2009:47), metode pengumpulan biaya produksi sebagai berikut :

1. *Job Order Costing*

Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan (*Job Order Costing*), biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Ada tujuh langkah dalam pembebanan biaya dalam sistem job costing pada perusahaan manufaktur :

1. Identifikasi pekerjaan (job) yang dipilih sebagai objek biaya.
2. Identifikasi biaya langsung pekerjaan itu.
3. Pilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan.
4. Identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya.
5. Hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan.
6. Hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke pekerjaan.
7. Hitung biaya total pekerjaan dengan menambahkan seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke pekerjaan itu.

Beberapa karakteristik sistem penentuan harga pokok pesanan menurut Sofia (2014:75) yaitu :

1. Kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan, sehingga bentuk barang atau produk tergantung pada spesifikasi pesanan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan sehingga perhitungan total biaya produksi dihitung pada saat pesanan selesai.
3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat kartu harga pokok pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu biaya yang memuat informasi umum seperti nama pemesan, jumlah yang dipesan, tanggal pemesanan dan tanggal diselesaikan, informasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang ditentukan dimuka.
4. Penentuan harga pokok per unit produk dilakukan setelah produk pesanan yang bersangkutan selesai dikerjakan dengan cara membagi harga pokok produk pesanan dengan jumlah unit produk yang diselesaikan.

Estimasi Biaya Tenaga Kerja	xxx
Estimasi Biaya Bahan Baku	xxx
Estimasi Biaya Overhead	<u>xxx</u> +
Total Estimasi Biaya Produksi	xxx
Ditambah biaya non produksi	<u>xxx</u> +
Harga Pokok Pesanan	xxx

Menurut Sofia (2014:93), dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Pusat biaya umumnya adalah departemen tetapi bisa juga pusat pemrosesan dalam satu departemen. Persyaratan utama dalam sistem biaya proses adalah semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk yang diproduksi dalam satu pusat biaya selama satu periode harus sama dalam hal sumberdaya yang dikonsumsi. Jika semua unit dari produk yang dihasilkan dalam suatu pusat biaya adalah sama (homogen) pencatatan biaya dari setiap batch produk secara terpisah tidak lagi diperlukan. Menurut Bustami dan Nurlela (2012:91), karakteristik penentuan biaya proses antara lain adalah :

1. Aktivitas produksi bersifat terus-menerus.
2. Produk bersifat massa, dengan tujuannya mengisi persediaan yang siap jual.
3. Produk yang dihasilkan pada suatu departemen atau pusat biaya relatif sama dan berdasarkan standar.
4. Biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang telah dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi.
5. Pengumpulan biaya yang dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu.

Adapun perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan menurut Bustami (2012:92) terletak pada :

1. Pengumpulan biaya produksi

Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi.

2. Perhitungan harga pokok produksi per satuan

Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga pokok proses menghitung harga produksi per satuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode tersebut. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi (biasanya pada akhir bulan).

3. Penggolongan biaya produksi

Di dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Dalam metode harga pokok proses, pembebanan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk saja (seperti perusahaan semen, pupuk, dan bumbu masak). Karena harga pokok per satuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi.

4. Unsur biaya yang dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik

Di dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja (baik yang langsung maupun tidak langsung). Dalam metode ini biaya

overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu.

2.6 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi

Menurut Mulyadi (2012:17) metode penentuan harga pokok produksi adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya tersebut terdapat 2 pendekatan, yaitu :

1. Metode *Full Costing*

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap.

Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela (2012:40) Kalkulasi biaya penuh (*full costing*) merupakan suatu metode dalam perhitungan harga pokok yang dibebankan kepada produk dengan memperhitungkan seluruh biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Pada metode ini biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk jadi atau ke harga pokok penjualan berdasarkan tarif yang ditentukan pada aktivitas normal atau aktivitas yang sesungguhnya terjadi. Metode *full costing* memperhitungkan biaya tetap karena biaya ini dianggap melekat pada harga pokok persediaan baik barang jadi maupun persediaan barang dalam proses yang belum terjual dan dianggap harga pokok penjualan jika produk tersebut sudah habis dijual. Dengan demikian biaya produksi menurut metode *full costing* terdiri dari unsur-unsur biaya sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya bahan baku	xxx
Biaya tenaga kerja langsung	xxx
Biaya <i>overhead</i> pabrik variabel	xxx
Biaya <i>overhead</i> pabrik tetap	<u>xxx</u> +
Biaya produksi	xxx

2. Metode *Variabel Costing*

Variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang hanya berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik variabel . Dengan demikian biaya produksi menurut metode variabel *costing* terdiri dari unsur-unsur biaya produksi berikut :

Biaya bahan baku	xxx
Biaya tenaga kerja langsung	xxx
Biaya <i>overhead</i> pabrik variabel	<u>xxx</u> +
Biaya produksi	xxx

2.7 Metode Penentuan Harga Jual (*Cost Plus Pricing*)

Menurut Samryn (2012:38) Harga merupakan salah satu jenis informasi penting yang diterima pelanggan tentang suatu produk. Penetapan harga jual berhubungan dengan seluruh tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Krismiaji dan Aryani (2011:325) bahwa pendekatan umum dalam penentuan harga jual adalah menambah angka perkiraan laba (*markup*) pada harga pokok produksi. *Markup* adalah selisih antara harga jual dengan harga pokok produksi, *markup* biasanya berupa persentase tertentu dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga pokok produksi. Pendekatan ini disebut dengan *cost plus pricing* karena persentase *markup* yang telah ditentukan dimuka ditambah dengan harga pokok produksi untuk menentukan harga jual produk. Cara perhitungan dengan *markup* adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Markup} = \frac{\text{biaya non produksi} + \text{laba yang diharapkan}}{Hpp}$$

Laba yang diharapkan = % yang telah ditentukan perusahaan \times Hpp

2.8 Harga dalam Perspektif Islam

1. Larangan Menetapkan Harga dengan Salah

Dalam berbisnis (termasuk penetapan harga) tidak boleh menggunakan cara yang salah, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pernyataan al-Qur'an “dengan cara yang salah (batil)”, berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan tidak halal. Yang disebut dengan bisnis adalah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap dan riba atau perugian terhadap salah satu pihak maupun semua pihak dalam bisnis.

2. Harga Pada Pasar Islami, menurut Adiwarmman (2014:19)

Islam tidak memisahkan antara agama dengan negara serta materi dengan spiritual, sebagaimana yang dilakukan di Eropa dengan konsep sekulerismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim, individu muslim, individu dengan kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menetapkan harga suatu produk.

Salah satu rukun jual beli (bisnis) adalah adanya objek, berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan. Namun dalam memperjualbelikan objek tersebut jelas syarat dengan pertemuan penawaran dan permintaan yang disebut harga. Sehingga harga ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam praktek ekonomi dan bisnis Islam. Karena bisa saja harga terlalu tinggi melebihi kemampuan beli masyarakat dan sangat merugikan pihak yang membutuhkan (pembeli), serta mungkin bahkan tidak sanggup membeli. Dan bisa saja muncul berbagai macam kriminalitas karena hal tersebut. Atau mungkin harga terlalu rendah sampai melebihi biaya produksi, sehingga produsen mengalami kerugian.

Islam melarang pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan, hal ini didasarkan kepada sebuah hadits dari Abu Dawud, tentang keengganan Nabi Muhammad SAW untuk menentukan harga dalam sebuah transaksi jual-beli, Hadits tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam menekankan terciptanya pasar 'bebas' dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Akan tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan prinsip-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip keadilan dan mencegah kezaliman. Sehingga kegiatan jual beli yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman sangat dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi, dan perdagangan yang tidak sah lainnya. Jadi walaupun bebas tapi terikat, yaitu terikat pada syari'at Allah.

3. Urgensi Penetapan Harga, Menurut Asmuni (2016:5)

Ada dua tipe penetapan harga, yaitu tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan *supply* atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa atas dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidak adilan itu dilarang”. Ini berarti penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar.

Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.

Dalam penetapan harga, perbedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dengan pemasok luar yang memasukkan barangnya. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual, seperti rekanan importir. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, dimana sebenarnya secara lokal tidak membutuhkan kontrol atas harga barang karena akan merugikan pembeli. Dalam kasus harga barang di masa darurat (bahaya kelaparan, perang, dan sebagainya), bahkan ahli ekonomi modern pun menerima kebijakan regulasi harga akan berhasil dan efektif serta sukses dalam kondisi seperti itu.

4. Konsep keadilan harga, Hilal (2014:18)

Islam menganut mekanisme pasar yang berdasarkan kebebasan pasar dalam segala bentuk penentuan harga yang diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku (bebas namun terikat dengan aturan syariah). Sehingga perubahan yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti penimbunan dan monopoli.

Dalam menjalankan praktik transaksi di pasar, hal yang tidak dapat dilupakan adalah harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang. Dan dengan adanya harga, masyarakat dapat menjual dengan harga yang wajar (umum) dan dapat diterima. Keengganan sebagian muslim untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan supply menurut adat dan kebiasaan menjadi terbatas.

Mekanisme pasar yang sempurna adalah *resultan* dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu fenomena yang alamiah. Harga merupakan hal yang terpenting dalam melakukan transaksi perdagangan. Di dalam Islam, harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga

diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.

Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya. Adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam.

Dalam *muamalah*, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang mengalami kesempitan. Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *gharar*. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan *syari'at*. Sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tenang, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.

5. Peran Pemerintah dalam Regulasi Harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dalam hal ini pemerintah sebagai *plan maker*, memiliki kewajiban dalam mengatur pendistribusian kembali pekerjaan antara berbagai industri berdasarkan kuota-kuota tertentu bila pilihan masyarakat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara bebas tidak berhasil memenuhi persyaratan dari rencana tersebut, seperti penentuan standar hidup dan pendistribusian kekayaan baik melalui penerapan hukum waris Islam, zakat maupun penyediaan barang-barang konsumsi yang berlebih, yang berarti bahwa kapan saja ada orang yang memerlukannya, tidak seorangpun dalam masyarakat muslim berhak mengambilnya sebelum kebutuhan orang yang memerlukannya itu terpenuhi, meskipun hal ini tidak dimaksudkan pada ekulitarianisme secara mutlak.

- 1). Pasar bersaing tidak sempurna,
- 2). Keadaan darurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Ada beberapa hal yang menyebabkan mekanisme pasar terganggu, antara lain:

1. *Ikhtikar*, yaitu usaha dengan sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi.
2. *Najasi* yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga.
3. *Tadlis*, yaitu penipuan kuantitas, kualitas, harga pada saat pengiriman barang.

Untuk itu, peran pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial, yang didasarkan pada dua hal yakni; tanggungjawab timbal balik yang bersifat umum dan tuntutan rakyat terhadap pendapatan pemerintah. Tanggungjawab timbal balik yang bersifat umum, merupakan kewajiban individu setiap muslim tetapi dalam pelaksanaannya bersifat sebatas kemampuan. Sementara tuntutan rakyat terhadap pendapatan pemerintah merupakan landasan langsung yakni kewajiban negara untuk memenuhi standar kehidupan minimum dan kehidupan layak dibandingkan dengan kehidupan pada umumnya dalam masyarakat.

Hal yang juga penting adalah peran pemerintah sebagai pengawas, yang bertujuan pertama, untuk meningkatkan pemenuhan tujuan negara secara efisien, kedua, sebagai pemelihara *the rules of game* yang terkait dengan perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat.

Pada dasarnya jika pemerintah ingin mempengaruhi harga pasar, maka yang dilakukan adalah dengan cara mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga harga akan menyesuaikan. Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (*celling price*) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.



Hak Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Mapping Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
Bambang Hermanto /2016	Perhitungan Harga Pokok Pesanan (<i>Job Order Costing</i>) Produk “BRKT Number Plate K56” Pada PT. Rachmat Perdana Adhimetal.	Kualitatif	Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dari perhitungan harga pokok produksi berdasarkan teori akuntansi dengan menggunakan metode <i>Job Order Costing</i> pada Produk “BRKT Number Plate K56” Rp. 3.947,66 / Pcs.
Rully Kusumawardani / 2013	Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode <i>Job Order Costing</i> (Studi Kasus UMKM CV. TRISTAR Alumunium)	Deskriptif Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa perolehan harga pokok produksi menggunakan metode <i>job order costing</i> telah mencakup semua biaya kegiatan produksi selama proses produksi terjadi, yaitu untuk Etalase Rp. 1.076.379,85, untuk Jemuran Rp. 401.844,8 dan untuk Almari Rak Piring Rp. 1.267.497.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

Irwan Soejanto, dkk / 2016	Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) Berdasarkan <i>Job Order Costing</i>	Kualitatif	Harga Pokok Produksi tas <i>handle</i> besar dengan metode JOC yaitu Rp. 672.988, sedangkan tas Dennis Rp. 544.829 dan untuk harga pokok produksi tas Tomson Rp. 615.988
Putri Maya Wulandari / 2016	Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode <i>Job Order Costing</i> dan Penentuan Harga Jual Pada PD. Sulih Maulida Jaya	Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	harga pokok produksi kusen per- unit dengan metode <i>Job Order Costing</i> adalah Rp. 1.074.587,01 sedangkan menurut perusahaan adalah sebesar Rp. 980.000.
Mia Setiawati/ 2018	Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi T-Shirt Pada Konveksi Pak Agus	Kualitatif	Hasil perhitungan harga pokok produksi T-Shirt Pada Konveksi Pak Agus per pcs menurut metode <i>Job Order Costing</i> adalah Rp. 32.097/pcs.
Teguh Purnomo / 2013	Evaluasi Penerapan Metode <i>Job Order Costing</i> Dalam Penetapan Harga Pokok Produksi (Studi Kasus UKM Konveksi Moko)	Kualitatif	Perhitungan harga pokok produksi untuk pesanan 48 baju menurut perusahaan adalah Rp. 3.020.221 sedangkan menurut metode <i>Job Order Costing</i> untuk pesanan 48 baju adalah Rp. 3.124.221



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Irwanto, dkk / 2017	Analisis <i>Job Order Costing</i> Pada CV MEDIA MANDIRI	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi untuk spanduk dengan menggunakan metode <i>Job Order Costing</i> adalah Rp. 33.359 per pcs dengan harga jual adalah Rp. 40.030.
Lusi Aprilia Murti/ 2015	Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode <i>Job Order Costing</i> Pada CV. PITULAS SEMARANG	Kualitatif	Harga pokok produksi plakat per buah menurut metode <i>Job Order Costing</i> adalah Rp. 231.200 sedangkan menurut perusahaan adalah Rp. 129.905.